

NOTULENSI

LOKAKARYAPENGUATAN IMPLEMENTASI PERBUP ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN LUWU UTARA

Rabu-Kamis, 6-7 September 2023

Tempat : Hotel Bukit Indah Masamba
Tanggal/waktu : Rabu, 06 September 2023
Tujuan Rapat : Lokakarya Penguatan Implementasi Perbup Arsitektur SPBE
Kabupaten Luwu Utara
Pemimpin : Tim SPBE Usaid Erat
Moderator : Dinas Kominfo
Nama notulen : Liana Lahare

Sambutan Ibu Shinta (Provincial Coordinator USAID ERAT South Sulawesi):

Untuk memperkuat kualitas kerja terkait SPBE, maka dilakukan penguatan implementasi Perbup selama 2 hari. Inovasi SIMODIS (TOP 30 di Provinsi Sulsel), ini merupakan kerja keras kita semua, terutama Diskominfo, sehingga kami berharap SPBE luwu utara ini bisa jadi sebuah inovasi.

Sambutan Bupati Luwu Utara :

OKP Luwu Utara punya modal yang cukup baik, menjadi harapan kita untuk tidak hanya berhenti disitu dan terus mengimplementasikannya, Bagaimana Implementasi SPBE ?bahkan hari ini masih banyak kbid yang tidak mau ikut Bimtek dengan berbagai alasan. Regulasi terkait SPBE sudah cukup kuat yinggal bagaimana mengimplementasikannya. Setelah melalui penyesuaian , klo proses bisnisnya sudah final, maka tidak akan ada lagi tumpang tindih. Kalau bisa dimulai hari ini, kenapa harus tunggu tahun depan. Saya berharap ini bisa menjadi atensi bagi semua SKPD. Dengan diintegrasikannya SPBE ini memudahkan kita untuk semakin efektif, transparan dan akuntabel.

Mengutip harapan Ombudsman,SPBE Lutra, tidak stuck disitu saja tapi tetap berlanjut. Domain proses bisnis ini harus kita atensi sebaik-baiknya. berharap Luwu Utara bisa menjadi role model, bukan hanya di Luwu Utara, tapi hingga di Provinsi Sulawesi Selatan.

Layanan ini tentunya membutuhkan data dari Dinas Informasi.

Sebagai salah satu contoh, Layanan kawasan bebas asap rokok, sudah dibuatkan regulasinya, tapi implementasinya Nol Besar.

Saya berharap, kita semua tidak hanya produktif melahirkan regulasi, tapi juga pada implementasinya.

Materi Pertama

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Luwu Utara

Adhiawan Sugiharto (Narsum 1)

Luwu Utara menjadi salah satu lokus Usaid Erat.

SPBE terdiri dari beberapa domain :

1. Domain kegiatan pemerintahan
2. Teknologi dan informasi
3. Pelayanan

Ruang Lingkup SPBE:

1. Rencana Induk SPBE
2. Proses bisnisnya, (Bisnis)
3. Anggaran dan Belanja (Layanan)
4. Data dan Informasi (Aplikasi)

Jika bisnisnya sudah dijalankan, maka yakinlah yang lain akan mengikuti.

SPBE bukan hanya kerjaan Diskominfo saja, tapi semua OKP.

4 uraian besar :

1. Pengantar & Arah
2. Penilaian Indeks SPBE
3. Arsitektur & Peta Rencana SPBE
4. Konvergensi SPBE – SDI

Filosofi dasar tingkat kematangan :

1. Domain kebijakan
2. Domain tata kelola
3. Domain manajemen
4. Domain layanan

SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan :

1. Moderator (Kabag Ortala, Syawal Sammang) :Salah satu penilaian adalah SPBE, semua OKP yang hadir, ada layanan ada administrasi, OPD mana yang focus layanan dan OPD mana yang focus administrasi ?
2. Petakan OPD yang sudah punya aplikasi internal dan yang belum punya aplikasi !

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Isu dan signifikansi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

- Pelaksanaan inisiatif TIK
 - Tidak adanya standar acuan platform
 - Belum terlembaganya peran dan tanggung jawab
 - Signifikansi arsitektur SPBE
 - Signifikansi peta rencana SPBE
3. Tambahan dari moderator : Terkait SOP, baik SOP Layanan maupun Administrasi hampir semua OPD selesai. Untuk selanjutnya kami akan bekerja sama dengan semua OPD.

Arsitektur Bapelitbangda, terkait data dan informasi, yang bertanggung jawab adalah Bappelitbangda, sebagai koordinator data dan informasi, sehingga OPD paham dengan masing-masing tanggung jawabnya.

4. Pertanyaan dan pernyataan dari Diskominfo : terkait struktur organisasi, tidak ada lagi OPD yang tidak memiliki aplikasi, bahkan memiliki aplikasi khusus yang kita gunakan sendiri,

Pertanyaannya : Bagaimana mensinkronkan perencanaan dengan biro lain ?

Jawaban dari Narsum :

Ada pembagian tugas sesuai dengan Perbup, bukan dinas kominfo saja yang kerja. Terkait proses bisnis : Proses bisnis untuk Arsitektur tahun ini, kebutuhan yang akan dibangun ditahun 2025, prosesnya apa saja. Teman teman OPD perlu memahami bahwa yang diminta adalah nama datanya bukan datanya, aplikasinya juga begitu.

Sinergi SPBE – SDI

Keterkaitan lingkup SPBE – SDI

5. Pertanyaan dari moderator sebagai ex.Bapeda, siapa yang menentukan data apa yang bisa digunakan, kemudian bagaimana membedakan mana data survey dan mana data lainnya ?

Jawaban dari Narsum :

Diskominfo menjaga data kesesuaian dengan masing-masing OPD, jadi kominfo tidak mengatakan data tersebut benar atau salah tanpa adanya data pendukung dari masing-masing OPD.

Disepakati bahwa setelah data frontal finish, semua data OPD dirapikan dan dimasukkan ke Portal. Data diportal menjadi indikator dan spesifik digunakan oleh OPD yang bersangkutan.

Mengenai data, kami kesulitan saat mencari data, tidak jarang kami harus ke BPS. Apakah di skominfo atau di Bapelitbangda itu kita memasukkan indeks hingga kami dalam menyusun rencana kerja tidak pusing, apakah dimasukkan di website atau bgamna ?

Jawaban :

boleh memasukkan indicator ke portal, dengan ketentuan tidak secara manual tapi dilakukan secara otomatis mengikuti rumus.

Mana yang pas dilakukan ? untuk peta sendiri, , kita menggunakan data parsial.

Jangan terlalu sering memasukkan data secara berulang, karena akan merusak sistem.

Tambahan dari moderator :

Setiap BPS akan melaunching data, teman-teman OPD dipanggil untuk membandingkan angka-angka yang tidak sesuai.

Tambahan dan sarandari Ikbal, Dosen Muda Unismuh :

Ini merupakan kebutuhan semua pemerintahan di Indonesia termasuk di Lutra, hanya saja kita agak lemah di implementasi. Salah satu faktornya, karena kurangnya sosialisasi khusus internal, barangkali juga dari SKPD sendiri yang kurang mengerti dan tidak mensosialisasikannya. Penerapan SPBE disetiap SKPD harus melakukan pelayanan SPBE untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kemudian untuk calon pengguna juga perlu disosialisasikan mengenai SPBE ini. Dengan sistem barcode, saya rasa SPBE ini sangat memudahkan setiap SKPD untuk memberikan pelayanan dan informasi. Kami dari pihak kampus juga siap bekerja sama semampunya jika dibutuhkan.

Pertanyaannya :Apa nama aplikasinya ?

Tambahan dari moderator :

ini berbicara mengenai transformasi sistem kerja. Dengan sistem ini kami berharap, nilai indeks yang tadinya 2,9 bisa naik menjadi 3.

UMPAN BALIK

Dari Pak Irwan, Diskominfo

Apa implementasi SPBE di Luwu Utara ?

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 kita selalu dievaluasi dan dari panduan ini yang membawa kita ke SPBE.

1. Kebijakan :

Bisa dikatakan Luwu Utara ini yang pertama mengeluarkan Perbup terkait SPBE.

2. Tata Kelola : Aplikasi layanan

3. Manajemen : Bagaimana manage aplikasi

4. Layanan : 10 layanan strategis dan 4 layanan public

Dari semua layanan strategi dan layanan public ini, maka muncullah SPBE untuk mengatur semua itu dan bagaimana mengimplementasikannya.

Perbup Arsitektur SPBE ini belum sempurna dan selalu direview untuk meningkatkan tingkat kematangannya.

Dampak Perbup Arsitektur SPBU, munculnya beberapa aplikasi tanpa koordinasi yang juga menjadi salah satu identifikasi masalah.

IDENTIFIKASI MASALAH

Oleh Tim SPBE Usaid Erat

Mensosialisasikan Perbup SPBE :

Kendala :

- Apakah kebijakan belum kuat ?
- Tim koordinasi SPBE , sudah beberapa kali melakukan rapat, format SK belum memiliki tugas-tugas pokok secara detil masing-masing SKPD untuk SPBE

1. Pertanyaan dari Kabag Ortala : Pelayanan Publik PPKE, salah satu indicator yang menjadi kurang/tidak terisi (kosong) yaitu masalah Spanlapor, beberapa unit pelayanan terkendala di Spanlapor ? Sejauh mana implementasi SP4N LAPOR ?

Jawaban dari Diskominfo : Sp4nlapor sebagai layanan aduan masyarakat,, aduan ini bersifat public. Jika aduan tidak masuk ke Sp4n lapor berarti tim Sa4nlapor tidak mengelola aduan

sehingga aduan tidak tembus ke Kominfo dan bisa jadi Pihak pelayanan Publik tidak mengetahui ada layanan aduan .

Masukan dari Pak Adhiawan : admin harus jelas, jika sp4n lapor mengalami kendala, maka social media lainnya bisa dimanfaatkan.

Sanggahan/tambahan dari Pak Ikbal, Dosen Unismuh :

- Semua layanan aduan masyarakat harus tersosialisasi dengan baik khususnya untuk calon pengguna.
- Seperti apa seharusnya pelayanan ini, agar semua SKPD bisa melakukan tugasnya dengan baik, terutama buat admin pelayanan.

Kadis Kominfo : 2 tahun terakhir meraih tingkat pertama terkait SPBE. Sp4n Lapor terdeteksi di Kemenpan ada aduan yang tidak dilaporkan.

Kendalanya :

- Dari SDM SKPD yang sering berganti admin.
- Sosialisasi yang minim
- Admin yang khatam tentang Aplikasi layanan aduan dipindah tugaskan
- Infrastruktur yang bermasalah
- Nilai (58 % masyarakat cenderung memilih face to face dibanding menggunakan teknologi untuk menyampaikan aduannya)

Mencermati beberapa problem di atas, ditempuh beberapa langkah :

- Tata kelola SPBE yang perlu dicermati
- Sp4n Lapor harus diberi pemahaman hingga ditingkat Desa
- Butuh SDM yang bertalenta untuk mengakselerasi era digital di Luwu Utara

Tambahan dari Ikbal, Dosen Unismuh, SPBE ini harus jadi prioritas agar mampu meminimalisir . Terkait masalah admin SKPD pengganti harus dilatih terlebih dahulu sebelum admin terlatih dipindah tugaskan.

2. Pertanyaan dari Bapelitbangda :Permasalahan penyelenggaraan SPBE dibutuhkn jabatan fungsional dan tata kelola, sedangkan kami tidak memiliki jabatan itu, Tenaga ahli tidak tersedia di Bapelitbangda, Berharap ada pendampingan dari Ortala untuk menganalisis jabatan, mengusulkan adanya jabatan fungsional.

Untuk koordinator satu data, SK sudah ada, tapi kami belum disediakan klasifikasi sifat data.

Kendala di PU adalah keterbatasan SDM, sehingga penyediaan data sering saling tunjuk antar PU dan Kesehatan mengenai akses air minum, karena memang ada

kesamaan akses varian data mengenai itu, Apa mekanisme dari variable yang sama untuk indicator yang berbeda ?

Bagaimana status portal satu data ?

Jawaban : Indikator data untuk mengetahui berada di bagian mana, apakah di Ortala atau lainnya.

Melihat situasi ini, portal satu data belum jalan. Langkah pertama jalankan dulu portal satu datanya kemudian koordinasi dengan BPS mengenai akses varian data.

Terkait portal satu data, kita bekerja sama dengan PPID untuk mengumpulkan data lalu dimasukkan di website IPD.

Materi ke 3 :

Penguatan Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Peran Strategis Kemendagri :

- Urusan Pemerintah Daerah
 - Absolut
 - Konkuren
 - Pemerintahan Umum

- Indeks SPBE dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan.

Kondisi Luwu Utara saat penerapan SPBE :

- Kondisi jumlah dan kompetensi ASN
- Tata kelola tidak terpadu
- Inefisiensi Teknologi Informasi dan Komunikasi

TANYA JAWAB

Deskripsi singkat dari Pak Irwan, Kominfo, Kabid Apika : Terkait SPBE, kami ada Perbup No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Perbup ini kedepannya akan direview jika diperlukan untuk mengoptimalkan regulasi.

Domain layanan ada 16 layanan : 10 Layanan administrasi pemerintahan dan 6 layanan Publik.

Terkait aduan kami menggunakan Sp4n Laporan.

Terkait pengadaan barang dan jasa kami menggunakan SRIKANDI.

Karena keterbatasan kami menggunakan Pusat Data Nasional untuk menyimpan data.

Tanggapan dari Narsum :

Dari jenis layanan yang disampaikan, pertanyaannya adalah. Apakah tidak ada layanan public yang afiliasi penggunaannya adalah masyarakat ?

Jawaban Pak Irwan :

Terkait kesehatan banyak aplikasi public yang kami gunakan, misalnya, siskamil, ada Sitem pendapatan daerah, di kominfo ada proses pengumpulan data, portal satu forum sementara kami kembangkan.

Terkait aplikasi ada sekitar 25 yang kami gunakan.

Pertanyaan :

Salah satu domain yaitu Proses Bisnis, proses yang telah disusun di arsitektur kami, kami coba masukkan di aplikasi tapi belum sempurna. Apakah dari Mendagri ada solusi atau pendampingan untuk kami ?

Jawaban :

Kita harus mengenali jenis layanan yang kita berikan, maka kita bisa menginventarisasi berapa proses bisnis.

- * Kenali jenis layanan
- * Inventarisasi proses bisnis

Terkait pendampingan, silahkan bersurat untuk kami tindak lanjuti.

Digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan, suka atau tidak kita harus melaluinya, dari pelayanan Konvensional ke Era Digital.

NOTULENSI LOKAKARYA (HARI II)

Tempat	: Hotel Bukit Indah Masamba
Tanggal/waktu	: Kamis, 07 September 2023
Tujuan Rapat	: Lokakarya Penguatan Implementasi Perbup Arsitektur SPBE Kabupaten Luwu Utara
Pemimpin	: Tim SPBE Usaid Erat
Moderator	: Dinas Kominfo
Nama notulen	: Liana Lahare

Strategi Implementasi Peta Rencana SPBE Luwu Utara Tim SPBE Usaid Erat

Ada 47 indikator yng dinilai di SPBE

Peta Rencana Pengembangan SPBE

1. Peta rencana Pengembangan Arsitektur proses bisnis
2. Peta rencana Pengembangan Arsitektur datadan informasi
3. Peta rencana Pengembangan Arsitektur Aplikasi
4. Peta rencana Pengembangan Arsitektur Infrastruktur
5. Peta rencana Pengembangan Arsitektur Keamanan
6. Peta rencana Pengembangan Arsitektur SDM TIK
7. Peta rencana Pengembangan Arsitektur Kebijakan

Semua SKPD masing-masing sudah memiliki beberapa Aplikasi dalam pelayanannya.

Perbup SPBE disusun pada tahun 2021 tepatnya pada pandemic kemarin selama kurang lebih 3 bulan melalui daring. Untuk mengembangkan ini, kita akan mensosialisasikan sekaligus mereview.

Lutra sudah menetapkan lebih cepat dari pemerintah pusat terkait Perbup SPBE ini, sehingga sosialisasinya baru mulai berjalan.

TANYA JAWAB

Namri, BKPSDM : Ada beberapa kriteria, salah satunya adalah manajemen. Indeks profesionalitas . Berdasarkan arsitektur SPBE,

Terkait aplikasi : selain aplikasi yang dibuat SKPD, kami jg menginventarisasi aplikasi paten.Selain aplikasi lokal, juga ada aplikasi sesuai kebutuhan proses, dan aplikasi sekali pakai.

Kendalanya tidak semua aplikasi pusat mengakomodir kebutuhan kami, output nya berbeda, kewenangannya, dan aksesnya ,

Apakah kami harus menginventarisasi aplikasi ini atau bagaimana ?

Jika memungkinkan, kami meminta sedikit belanja (dana) untuk menambah nilai kerja.

Jawaban :

SKPD bisa memakai aplikasi yang ada kemudian dikoneksikan dengan aplikasi pusat untuk memungkinkan data diakomodasi di Simpeknas.

Terkait aplikasi lokal, aplikasi sesuai kebutuhan maupun sekali pakai silahkan dicatat.

Sebagai informasi kami di Luwu Utara menggunakan simpeknas. Di Simpeknas kami menggunakan 3 aplikasi, ada simpeknas itu sendiri E-kinerja dan ...

Data yang dimasukkan jangan menggunakan data pribadi.

Kita juga harus bisa memanaje transisi aplikasi agar data yang didalam sistem tetap aman.

Ada aplikasi tambahan dimasa transisi untuk mengantisipasi jika ada pergantian sistem.

Kita sudah melalui masa-masa transisi aplikasi, terutama di perencanaan.

Bapelitbangda : Pembagian tugas forum satu data , SK forum satu data. Bapelitbangda sebagai koordinator yang mengkoordinir dan Diskominfo sebagai wali data, kami hanya ingin menyatukan persepsi bahwa pengumpulan data itu bukan tugas wali data tapi tugas koordinator data.

Sebetulnya tugas utamaannya adalah memfasilitasi, sehingga sebagai wali data bisa dilakukan pengumpulan data melalui BPS maupun Bapelitbangda., karena yang dibutuhkan itu standart dan kebenaran datanya.

Pembahasan Penugasan SK Tim Koordinasi SPBE Luwu Utara

Tim SPBE Usaid Erat

Diskominfo :

SK Tim belum belum menjelaskan secara detil tugas masing-masing SKPD, masih tersusun secara umum, maka dipandang perlu untuk dilakukan review.

Untuk saat ini, Tim Luwu Utara masih mengikuti SK yang ada dan akan segera meramu review SK untuk kedepannya.

Ikkal, Dosen Unismuh :

Harus jelas pembagian tugas masing-masing SKPD untuk meminimalisir kekeliruan dan saling tunjuk.

Model SK ini masih sama ditahun 2008 yang sifatnya umum, maka melalui kegiatan Lokakarya ini, SK lama akan kita review dengan bantuan dari Narasumber apabila ada referensi mengenai penyusunan SK yang lebih detil.

Bagian Pemerintahan :

Pembahasan SK terkait tupoksi, kami minta pembahasan perbup dlu baru kemudian pembagian tupoksi masing-masing SKPD secara detil.

Arsitektur SPBE dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir dilaksanakan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Review SK :

Bab VI

Audit

1)

2)

3)

dst..... Aman

BAB VII

3). c. Kepala Dinas Kominformasi

4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE **seluruh SKPD dilingkungan Luwu Utara** antar Pemerintah Daerah/atau instansi pusat.

Refeksi atas Paparan dari Diskusi

Kadis Kominfo Luwu Utara

Percepatan Reformasi Birokrasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Kinerja pelayanan Infrastruktur TIK dan keamanan Informasi

1. Penyederhaan birokrasi (indeks digital)
2. Pemulihan ekonomi melalui manajemen kerja berbasis digital (peningkatan kualitas SDM)
- 3.

Tematik layanan Digital pemerintah

- * Layanan public (SPM)
- * Layanan Bisnis (perdagangan, perindustrian, penyiaran, kawasan ekonomi)
- * Layanan administrasi pemerintah

Gambaran SPBE Luwu Utara

Indeks SPBE

2018 2,11

2019 2,77

2020 2,71

2021 2,68

2022 2,93

Ini merupakan sebuah pencapaian di Luwu Utara karena berhasil menjadi no 1 dan pertama di Sulawesi Selatan.

Capaian ini tentu atas kerjasama semua teman-teman SKPD

Arsitektur Pemda tidak boleh bertentangan dengan arsitektur nasional.

Manfaat arsitektur SPBE

1. Mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan
2. Menerapkan standarisasi TIK
3. Memudahkan integrasi layanan TIK
4. Mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem aplikasi
5. Berbagi data dan informasi
6. Meningkatkan efisiensi biaya SPBE

Tantangan Implementasi Arsitektur SPBE

- Sdm
- Sistem kerja

- Infrastruktur
- Anggaran
- Kelembagaan

Nilai SPBE :

- efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- dinamis dan adaptif
- humanis dan aplikatif (kehadiran SPBE ini tidak boleh mengurangi silaturahmi)

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pembahasan sesi RTL difasilitasi oleh Bahar Makkutana District Facilitator USAID ERAT LUWU UTARA.

Adapun usulan dan kesepakatan RTL dalam lokakarya Penguatan Implementasi Perbup Arsitektur SPBE Luwu Utara, sebagai berikut:

1. Reviu dan revisi SK Tim Koordinasi SPBE Luwu Utara
2. Reviu dan Revisi Perbup SPBE Luwu Utara
3. Revisi Perbup Arsitektur SPBE Luwu Utara
4. Monitoring dan Evaluasi penerapan SPBE Luwu Utara
5. Sosialisasi SPBE secara intens di lingkup SKPD Luwu Utara
6. Audit Internal SPBE Luwu Utara

PENUTUP

Lokakarya Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Luwu Utara